

DIPA FAKULTAS

**LAPORAN AKHIR
KEGIATAN PENELITIAN**



**KAJIAN DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP KINERJA DAN
PEMERATAAN EKONOMI DAERAH PESISIR DI PROVINSI BENGKULU**

Oleh :

**Ir. NYAYU NETI ARIANTI, M.Si. (NIDN. 0027106803)
INDRA CAHYADINATA, S.P., M.Si. (NIDN. 0007057804)**

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS BENGKULU**

NOPEMBER 2013



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BENGKULU
LEMBAGA PENELITIAN

Jalan WR Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371
Telepon : 0736-21170, 342584. Fax. : 0736-342584
Laman : <http://www.unib.ac.id>. E-mail : lembaga.penelitian.unib@gmail.com.

SURAT KETERANGAN

Nomor : 941 /UN30.10/LT/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Sarwit Sarwono, M.Hum.
NIP : 195810121986031003
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Bengkulu

Dengan ini menerangkan bahwa:

| No | Nama | NIDN | Jabatan | Fakultas |
|----|-------------------------------|------------|---------|-----------|
| 1 | Ir. Nyayu Neti Arianti, M.Si. | 0027106803 | Ketua | Pertanian |
| 2 | Indra Cahyadinata | 0007057804 | Anggota | Pertanian |

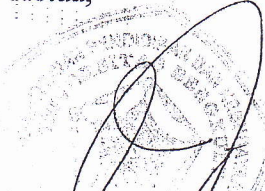
Benar-benar telah melaksanakan Penelitian Dosen Dana DIPA Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu Tahun 2013, dengan judul: "Kajian Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kinerja dan Pemerataan Ekonomi Daerah Pesisir di Provinsi Bengkulu".

Hasil penelitian tersebut telah diserahkan kepada Lembaga Penelitian Universitas Bengkulu.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 16 Desember 2013

Ketua,


Drs. Sarwit Sarwono, M.Hum.
NIP 19581012 198603 1 003

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Kajian Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Kinerja dan Pemerataan Ekonomi Daerah Pesisir di Provinsi Bengkulu

Peneliti/Pelaksana
Ketua
Nama Lengkap : Ir. Nyayu Neti Arianti, M.Si.
NIDN : 0027106803
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : Agribisnis
Nomor HP : 081367741511
Alamat surel (e-mail) : nyayunetiarianti@yahoo.co.id
Anggota

Nama Lengkap : Indra Cahyadinata, S.P. M.Si.
NIDN : 0007057804
Perguruan Tinggi : Universitas Bengkulu
Institusi Mitra (jika ada) : -
Nama Institusi Mitra :
Alamat :
Penanggungjawab :
Tahun Pelaksanaan : 2013
Biaya Keseluruhan : Rp 10.000.000,-

Bengkulu, Nopember 2013

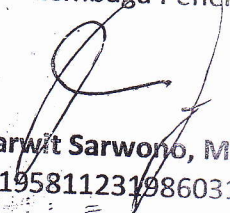
Ketua Tim Pelaksana/Peneliti,


Ir. Nyayu Neti Arianti, M.Si.
NIP. 196810271994032003

Mengetahui,
Dekan


Prof. Dr. Ir. Dwinardi Apriyanto, M.Sc.
NIP. 195804211984031002

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian


Drs. Sarwit Sarwono, M.Hum.
NIP. 195811231986031002

RINGKASAN

Kegiatan penelitian ini dilatarbelakangi bahwa sejak tahun 2003 Provinsi Bengkulu mengalami pemekaran wilayah. Saat ini terdapat enam kabupaten baru (Daerah Otonom Baru, DOB) yang merupakan hasil pemekaran dari tiga kabupaten sebelumnya (Daerah Induk). Kegiatan pemekaran wilayah-wilayah kabupaten ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek. Konsekuensi dari pemekaran itu adalah terdapat Daerah Induk, DOB dan Daerah Mekar, dimana Daerah Mekar adalah gabungan antara Daerah Induk dan DOB.

Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak pemekaran wilayah terhadap 1) Kinerja ekonomi daerah pesisir di Provinsi Bengkulu sebelum dan setelah pemekaran wilayah, 2) Kinerja ekonomi Daerah Induk, DOB dan Daerah Mekar pesisir setelah pemekaran wilayah, dan 3) Tingkat pemerataan/kesenjangan ekonomi daerah pesisir di Provinsi Bengkulu sebelum dan setelah pemekaran wilayah.

Metode analisis data meliputi analisis kinerja ekonomi wilayah pesisir di Provinsi Bengkulu sebelum dan setelah pemekaran wilayah, kinerja ekonomi Daerah Induk, DOB dan Daerah Mekar pesisir setelah pemekaran wilayah dan analisis pemerataan/kesenjangan ekonomi daerah pesisir sebelum dan setelah pemekaran wilayah. Indikator-indikator kinerja ekonomi yang digunakan adalah Pertumbuhan PDRB Non-migas (ECGI), PDRB per Kapita (WELFI), dan Angka Kemiskinan (POVEI).

Hasil penelitian tentang perbandingan rata-rata kinerja ekonomi daerah pesisir di Provinsi Bengkulu antara sebelum dan setelah pemekaran wilayah menunjukkan bahwa : a) untuk indikator pertumbuhan ekonomi, tidak ada perbedaan antara sebelum dan setelah pemekaran wilayah, b) untuk indikator PDRB per kapita, berbeda nyata, dimana PDRB per kapita setelah pemekaran wilayah lebih tinggi dibanding sebelum pemekaran wilayah, dan c) untuk indikator angka kemiskinan, tidak ada perbedaan antara sebelum dengan setelah pemekaran wilayah. Hasil analisis kinerja ekonomi Daerah Induk, DOB dan Daerah Mekar pesisir di Provinsi Bengkulu setelah pemekaran wilayah dapat dijelaskan a) pertumbuhan

ekonomi Daerah Inti paling tinggi dan relatif stabil sedang pertumbuhan ekonomi DOB paling rendah dan cenderung fluktuatif, b) PDRB per kapita tertinggi terjadi di Daerah Inti dan yang terendah di DOB, dan c) angka kemiskinan paling rendah terdapat di Daerah Inti dan yang tertinggi di DOB. Tingkat kesenjangan ekonomi daerah pesisir di Provinsi Bengkulu setelah pemekaran wilayah lebih tinggi dibanding sebelum pemekaran wilayah.

PRAKATA

Alkhamdulillaah, segala puji syukur kami panjatkan kepada Allaah SWT karena atas rakhmat dan rakhimNya kegiatan penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Laporan akhir kegiatan penelitian ini dapat pula diselesaikan tanpa halangan berarti.

Judul penelitian ini adalah “Kajian Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Kinerja dan Pemerataan Ekonomi Daerah Pesisir di Provinsi Bengkulu”. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi semacam bentuk evaluasi dari pemekaran Provinsi Bengkulu terutama bagi daerah-daerah pesisir. Hasil penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi bahan masukan bagi penyusunan kebijakan pengembangan Daerah-daerah Otonomi Baru yang relatif masih tertinggal dibanding Daerah Inti. Dengan demikian tujuan pemekaran wilayah yakni agar kesejahteraan masyarakat semakin merata dapat terwujud.

Dalam kesempatan ini, kami tim peneliti/pelaksana mengucapkan terimakasih kepada pihak penyedia data yaitu BPS Provinsi Bengkulu dan pihak-pihak lain yang telah membantu kelancaran kegiatan penelitian ini. Semoga laporan ini memberi manfaat yang besar bagi kita semua.

Tim Peneliti/Pelaksana,

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| PRAKATA | iii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR TABEL | vi |
| DAFTAR GAMBAR | vii |
| DAFTAR LAMPIRAN | viii |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 3 |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA | 4 |
| 2.1. Prinsip Pemekaran Wilayah | 4 |
| 2.2. Tujuan dan Dampak Pemekaran Wilayah | 5 |
| BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN | 10 |
| 3.1. Tujuan..... | 10 |
| 3.2. Manfaat | 10 |
| BAB IV. METODE PENELITIAN | 11 |
| 4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian | 11 |
| 4.2. Jenis dan Metode Pengumpulan Data | 11 |
| 4.3. Analisis Data | 11 |
| BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN | 14 |
| 5.1. Gambaran Umum Daerah | 15 |
| 5.2. Perbandingan Kinerja Ekonomi Daerah Pesisir di Provinsi Bengkulu Sebelum dan Setelah Pemekaran Wilayah | 17 |
| 5.3. Kinerja Ekonomi Daerah Induk, DOB dan Daerah Mekar Pesisir di Provinsi Bengkulu Setelah Pemekaran Wilayah | 22 |
| 5.4. Pemerataan/Kesenjangan Ekonomi antar Daerah Pesisir di Provinsi Bengkulu Sebelum dan Setelah Pemekaran Wilayah | 30 |

| | |
|------------------------------|----|
| BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN | 33 |
| 6.1. Kesimpulan | 33 |
| 6.2. Saran | 33 |
| DAFTAR PUSTAKA | 35 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|---------|
| 1. Daerah-daerah Pesisir dan Non Pesisir di Provinsi Bengkulu Sebelum dan Setelah Pemekaran | 2 |
| 2. Gambaran Umum Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Sebelum dan Setelah Pemekaran Wilayah | 15 |
| 3. Gambaran Umum Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Sebelum dan Setelah Pemekaran Wilayah | 16 |
| 4. Gambaran Umum Daerah Kabupaten Seluma | 16 |
| 5. Gambaran Umum Daerah Kabupaten Kaur | 17 |
| 6. Gambaran Umum Daerah Kabupaten Mukomuko | 17 |
| 7. Rata-rata Pertumbuhan PDRB Daerah Pesisir Sebelum dan Setelah Pemekaran Wilayah | 18 |
| 8. Rata-rata PDRB per Kapita Daerah Pesisir Sebelum dan Setelah Pemekaran Wilayah | 19 |
| 9. Rata-rata Angka Kemiskinan Daerah Pesisir Sebelum dan Setelah Pemekaran Wilayah | 21 |
| 10. Rata-rata Pertumbuhan PDRB Daerah Inti, DOB dan Daerah Mekar Setelah Pemekaran Wilayah | 23 |
| 11. Rata-rata Pertumbuhan PDRB Daerah Inti, DOB dan Daerah Mekar Tahun 2006 sampai 2011 (Data Tahun 2008 Dikeluarkan) | 23 |
| 12. Rata-rata PDRB per Kapita Daerah Inti, DOB dan Daerah Mekar Setelah Pemekaran Wilayah | 28 |
| 13. Rata-rata Angka Kemiskinan Daerah Inti, DOB dan Daerah Mekar Tahun Setelah Pemekaran Wilayah (Tahun 2005 sampai 2011)..... | 29 |
| 14. Tingkat Kesenjangan Ekonomi yang Diukur dengan Indeks Williamson (IW) antar Daerah Pesisir Sebelum dan Setelah Pemekaran Wilayah | 31 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|---|---------|
| 1. Perkembangan Rata-rata Pertumbuhan PDRB Daerah Inti, DOB dan daerah Mekar (dalam %) Tahun 2006 sampai 2011 | 25 |
| 2. Perkembangan Rata-rata PDRB per Kapita Daerah Inti, DOB dan daerah Mekar (dalam Rupiah)(Kiri) dan Angka Kemiskinan (dalam %) (Kanan) | 29 |
| 3. Perkembangan Nilai Indeks Kesenjangan Williamson antar Daerah Pesisir Sebelum Pemekaran Wilayah (Kiri) dan Setelah Pemekaran Wilayah (Kanan) | 32 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | Halaman |
|---|---------|
| 1. Pertumbuhan PDRB Daerah Pesisir Sebelum Pemekaran Wilayah | 37 |
| 2. Pertumbuhan PDRB Daerah Pesisir Setelah Pemekaran Wilayah | 38 |
| 3. Penghitungan Nilai t Hitung (t hit) Indikator Kinerja Ekonomi Pertumbuhan PDRB Daerah Pesisir | 40 |
| 4. PDRB per Kapita Daerah Pesisir Sebelum Pemekaran Wilayah | 41 |
| 5. PDRB per Kapita Daerah Pesisir Setelah Pemekaran Wilayah | 42 |
| 6. Penghitungan Nilai t Hitung (t hit) Indikator Kinerja Ekonomi PDRB per Kapita Daerah Pesisir | 45 |
| 7. Angka Kemiskinan Daerah Pesisir Sebelum dan Setelah Pemekaran Wilayah | 46 |
| 8. Penghitungan Nilai t Hitung (t hit) Indikator Kinerja Ekonomi Angka Kemiskinan Daerah Pesisir | 47 |
| 9. Rata-rata Pertumbuhan PDRB Daerah Inti Setelah Pemekaran Wilayah ... | 48 |
| 10. Rata-rata Pertumbuhan PDRB DOB Setelah Pemekaran Wilayah | 49 |
| 11. Rata-rata Pertumbuhan PDRB Daerah Mekar Setelah Pemekaran Wilayah | 50 |
| 12. Rata-rata Pertumbuhan PDRB Daerah Inti, DOB dan Daerah Mekar Setelah Pemekaran Wilayah | 51 |
| 13. Rata-rata PDRB per Kapita Daerah Inti, DOB dan Daerah Mekar Setelah Pemekaran Wilayah | 52 |
| 14. Rata-rata Angka Kemiskinan Daerah Inti, DOB dan Daerah Mekar Setelah Pemekaran Wilayah | 53 |
| 15. Penghitungan Indeks Kesenjangan Ekonomi (IW) Daerah Pesisir Sebelum Pemekaran Wilayah | 54 |
| 16. Penghitungan Indeks Kesenjangan Ekonomi (IW) Daerah Pesisir Setelah Pemekaran Wilayah | 57 |

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengiringi dinamika politik yang berkembang sejak awal era reformasi khususnya berkaitan dengan diberlakukannya UU nomor 22 tahun 1999 bermunculan keinginan berbagai daerah untuk memekarkan diri membentuk daerah otonom baru. Pemerintah menerbitkan PP nomor 129 tahun 2000 tentang Pemekaran Daerah yang mengatur antara lain tentang instrumen prosedural dan instrumen persyaratan pemekaran daerah. Setelah diberlakukannya Undang-undang No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah pemekaran wilayah administratif, pada tahun 2004, pemerintahan provinsi telah bertambah dari 26 menjadi 33 (26,9 %), sedangkan pemerintah kabupaten/kota meningkat 45,2%, dari 303 menjadi 440 (Ajdaoke, 2012).

Namun menurut Handoko (2008) apakah sepenuhnya otonomi daerah dengan tujuan mensejahterakan rakyat dan mendekatkan pelayanan kepada rakyat itu berlangsung dengan baik untuk menghilangkan sekat-sekat atau jurang-jurang ketidakmakmuran dan jurang perbedaan antara segelintir kaum kaya dengan kaum miskin-papa, terutama yang ada di daerah-daerah otonom? Ternyata selama perjalanannya, otonomi daerah sebagai solusi untuk peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan tidak terlalu signifikan menunjukkan perbaikan taraf kehidupan masyarakat.

Wilayah Provinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 9 tahun 1967 dengan luas 19.813 km² letaknyamemanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat sampai ke perbatasan Provinsi Lampung dan jaraknya lebih kurang 567 km. Provinsi Bengkulu berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia pada garis pantai sepanjang lebih kurang 525 km. Pada awal pembentukannya Provinsi Bengkulu terdiri dari empat Daerah Tingkat II, yaitu Kotamadya Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Rejang Lebong (Witrianto,2013).Tiga dari empat daerahTingkat II tersebut berada di sepanjang pesisir, yaitu Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan dan Kota Bengkulu.

Sejak tahun 2003 Provinsi Bengkulu mengalami pemekaran wilayah. Saat initerdapat enam kabupaten baru (Daerah Otonom Baru, DOB) yang merupakan hasil pemekaran dari tiga kabupaten sebelumnya (Anonim, 2009), yaitu :

1. Kabupaten Mukomuko, pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara,
2. Kabupaten Seluma, pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan,
3. Kabupaten Kaur, pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan,
4. Kabupaten Kepahiang, pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong,
5. Kabupaten Lebong, pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong, dan
6. Kabupaten Bengkulu Tengah, pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara, pada 24 Juni 2008.

Kegiatan pemekaran wilayah-wilayah kabupaten ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek. Konsekuensi dari pemekaran itu adalah terdapat Daerah Induk, DOB dan Daerah Mekar, dimana Daerah Mekar adalah gabungan antara Daerah Induk dan DOB. Pembentukan DOB dilakukan dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah dalam kerangka pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal. Sehingga dengan adanya pemekaran wilayah, aspek-aspek kehidupan masyarakat terutama aspek ekonomi diharapkan akan menjadi lebih baik dan merata. Pada Tabel 1 tertera Daerah Tingkat II di Provinsi Bengkulu sebelum dan setelah pemekaran tahun 2003. Daerah Tingkat II Kota Bengkulu tidak mengalami pemekaran.

Tabel 1. Daerah-daerah Pesisir dan Non Pesisir di Provinsi Bengkulu Sebelum dan Setelah Pemekaran

| Pesisir | | | Non Pesisir | | |
|-------------------------------|---|---|----------------------------|---|---|
| Daerah Induk | DOB | Daerah Mekar | Daerah Induk | DOB | Daerah Mekar |
| 1. Kabupaten Bengkulu Utara | 1. Kabupaten Mukomuko 2. Kabupaten Bengkulu Tengah | 1. Kabupaten Bengkulu Utara 2. Kabupaten Bengkulu Selatan | 1. Kabupaten Rejang Lebong | 1. Kabupaten Kepahiang 2. Kabupaten Lebong | 1. Kabupaten Rejang Lebong 2. Kabupaten Kepahiang 3. Kabupaten Lebong |
| 2. Kabupaten Bengkulu Selatan | 1. Kabupaten Seluma 2. Kabupaten Kaur | 3. Kabupaten Mukomuko 4. Kabupaten Bengkulu Tengah 5. Kabupaten Seluma 6. Kabupaten Kaur | | | |

1.2. Rumusan Masalah

Pemekaran wilayah akan berdampak pada kinerja perekonomian wilayah atau daerah yang menjadi indikator kesejahteraan masyarakat, baik di Daerah Induk, Daerah Otonom Baru (DOB), maupun Daerah Mekar. Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak pemekaran wilayah terhadap kinerja ekonomi daerah pesisir di Provinsi Bengkulu?
2. Bagaimana dampak pemekaran wilayah terhadap kesenjangan ekonomi antar daerah pesisir di Provinsi Bengkulu?

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Prinsip Pemekaran Wilayah

Perkembangan wilayah biasanya merupakan wujud dari keinginan masyarakat di suatu daerah untuk tumbuh dan berkembang dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan, dalam dimensi geografis. Tingkat perkembangan wilayah dapat dilihat dari rasio luas wilayah terbangun (*built-up area*) terhadap total luas wilayah. Semakin besar rasionya, maka semakin tinggi tingkat perkembangan wilayahnya. Semakin luas *built-up areanya* dapat diartikan semakin tinggi aktivitas ekonomi masyarakatnya. Kondisi tersebut dapat dilihat dari semakin rapatnya jaringan jalan, semakin meluasnya wilayah perkantoran dan perdagangan, semakin menyebarnya wilayah pemukiman dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan tingginya peluang kerja (Harmantyo, 2011).

Selanjutnya Harmantyo (2011) menyatakan dengan semakin meningkatnya kegiatan ekonomi mulai dari pusat pusat bisnis (*Central Business District* atau CBD) yang cenderung berkembang ke arah luar, baik secara difusif maupun secara lompatan katak (*leaf frog*), mengakibatkan tumbuhnya kota kota satelit sebagai lokasi pemukiman baru. Oleh karena sebuah pemukiman kota baru atau kota satelit membutuhkan luas tanah yang besar dan di dalam wilayah kota sendiri ketersediaan tanah semakin terbatas dan cenderung sangat mahal, maka lokasi kota kota baru tersebut akan menyebar di luar wilayah kota asalnya. Proses inilah yang kemudian menyebabkan wilayah administratif tetangganya memperoleh manfaat dengan semakin berkembangnya daerah perbatasannya.

Berkembangnya wilayah administratif yang berbatasan dengan kota kota besar inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Daerah Otonom Baru (DOB) dari pemekaran daerah induknya. Proses seperti inilah yang semestinya menjadi acuan dasar dalam melahirkan DOB di Indonesia. Sebuah daerah yang sudah layak menjadi daerah otonom karena memiliki potensi ekonomi yang memenuhi syarat bagi kehidupan warganya untuk dapat tumbuh dan berkembang. Secara perlahan tapi pasti, tanpa menimbulkan beban keuangan negara, wilayah tersebut akan berkembang sesuai mekanisme pasar.

Menurut Anonim (2012) apapun alasannya, pemekaran daerah harus mengutamakan serta mengedepankan kesejahteraan rakyat. Alasan-alasan pemekaran wilayah adalah :

1. Alasan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini dijadikan alasan utama karena adanya kendala geografis, infrastruktur dan sarana perhubungan yang minim.

2. Alasan historis.

Pemekaran suatu daerah dilakukan karena alasan sejarah, yaitu bahwa daerah hasil pemekaran memiliki nilai historis tertentu.

3. Alasan kultural atau budaya (etnis).

Pemekaran daerah terjadi karena menganggap adanya perbedaan budaya antara daerah yang bersangkutan dengan daerah induknya.

4. Alasan ekonomi.

Pemekaran daerah diharapkan dapat mempercepat pembangunan di daerah.

5. Alasan anggaran.

Pemekaran daerah dilakukan untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah.

Sebagaimana diketahui daerah yang dimekarkan akan mendapatkan anggaran dari daerah induk selama 3 tahun dan mendapatkan dana dari pemerintah pusat (DAU dan DAK).

6. Alasan keadilan.

Pemekaran dijadikan alasan untuk mendapatkan keadilan. Artinya, pemekaran daerah diharapkan akan menciptakan keadilan dalam hal pengisian jabatan publik dan pemerataan pembangunan.

2.2. Tujuan dan Dampak Pemekaran Wilayah

Gulo (2007) menyatakan tujuan yang relevan dengan pemekaran daerah adalah untuk : 1) meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat, 2) memperkuat basis ekonomi rakyat, 3) mengatur perimbangan keuangan daerah dan pusat, 4) membuka peluang dan lapangan pekerjaan dan 5) memberikan peluang daerah mendapatkan investor secara langsung.

Menurut Khalid (2012), yang banyak diatur dalam regulasi yang ada selama ini adalah kebijakan tentang pemekaran daerah. Rumusan tujuan kebijakan pemekaran daerah telah banyak dituangkan dalam berbagai kebijakan-kebijakan yang ada selama ini, baik dalam Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah. Dalam regulasi-regulasi ini, secara umum bisa dikatakan bahwa kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui 1) peningkatan pelayanan kepada masyarakat, 2) percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, 3) percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, 4) percepatan pengelolaan potensi daerah, dan 5) peningkatan keamanan dan ketertiban.

Selanjutnya Khalid (2012) menyatakan pemekaran wilayah berimplikasi pada segala aspek kehidupan. Dampak-dampak pemekaran wilayah meliputi hal-hal sebagai berikut ;

1. Dampak Sosio Kultural

Dari dimensi sosial, politik dan kultural, bisa dikatakan bahwa pemekaran daerah mempunyai beberapa implikasi positif, seperti pengakuan sosial, politik dan kultural terhadap masyarakat daerah. Melalui kebijakan pemekaran, sebuah entitas masyarakat yang mempunyai sejarah kohesivitas dan kebesaran yang panjang, kemudian memperoleh pengakuan setelah dimekarkan sebagai daerah otonom baru. Pengakuan ini memberikan kontribusi positif terhadap kepuasan masyarakat, dukungan daerah terhadap pemerintah nasional, serta manajemen konflik antar kelompok atau golongan dalam masyarakat.

Namun demikian, kebijakan pemekaran juga bisa memicu konflik antar masyarakat, antar pemerintah daerah yang pada gilirannya juga menimbulkan masalah konflik horisontal dalam masyarakat. Sengketa antara pemerintah daerah induk dengan pemerintah daerah pemekaran dalam hal pengalihan aset dan batas wilayah, juga sering berimplikasi pada ketegangan antar masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah daerah.

2. Dampak pada Pelayanan Publik

Dari dimensi pelayanan publik, pemekaran daerah memperpendek jarak geografis antara pemukiman penduduk dengan sentra pelayanan, terutama ibukota pemerintahan daerah. Pemekaran juga mempersempit rentang kendali antara pemerintah daerah dengan unit pemerintahan di bawahnya. Pemekaran juga memungkinkan untuk menghadirkan jenis-jenis pelayanan baru, seperti pelayanan listrik, telepon, serta fasilitas urban lainnya, terutama di wilayah ibukota daerah pemekaran.

Pemekaran juga menimbulkan implikasi negatif bagi pelayanan publik, terutama pada skala nasional, terkait dengan alokasi anggaran untuk pelayanan publik yang berkurang. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan belanja aparat dan infrastruktur pemerintahan lainnya yang bertambah dalam jumlah yang signifikan sejalan dengan pembentukan DPRD dan birokrasi di daerah hasil pemekaran. Namun, kalau dilihat dari kepentingan daerah semata, pemekaran bisa jadi tetap menguntungkan, karena daerah hasil pemekaran akan memperoleh alokasi DAU dalam posisinya sebagai daerah otonom baru.

3. Dampak bagi Pembangunan Ekonomi

Pasca terbentuknya DOB terdapat peluang yang besar bagi akselerasi pembangunan ekonomi di wilayah yang baru diberi status sebagai daerah otonom dengan pemerintahan sendiri. Bukan hanya infrastruktur pemerintahan yang terbangun, tetapi juga infrastruktur fisik yang menyertainya, seperti infrastruktur jalan, transportasi, komunikasi dan sejenisnya. Selain itu, kehadiran pemerintah daerah otonom baru juga memungkinkan lahirnya infrastruktur kebijakan pembangunan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah otonom baru. Semua infrastruktur ini membuka peluang yang lebih besar bagi wilayah hasil pemekaran untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi.

Namun, kemungkinan akselerasi pembangunan ini harus dibayar dengan ongkos yang mahal, terutama anggaran yang dikeluarkan untuk membiayai pemerintahan daerah, seperti belanja pegawai dan belanja operasional pemerintahan daerah lainnya. Dari sisi teoritik, belanja ini bisa diminimalisir apabila akselerasi pembangunan ekonomi daerah bisa dilakukan tanpa menghadirkan pemerintah daerah otonom baru melalui kebijakan pemekaran daerah. Melalui kebijakan pembangunan ekonomi wilayah

yang menjangkau seluruh wilayah, akselerasi pembangunan ekonomi tetap dimungkinkan untuk dilakukan dengan harga yang murah. Namun, dalam perspektif masyarakat daerah, selama ini tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa pemerintah nasional akan melakukannya tanpa kehadiran pemerintah daerah otonom.

4. Dampak pada Pertahanan, Keamanan dan Integrasi Nasional

Pembentukan DOB bagi beberapa masyarakat pedalaman dan masyarakat di wilayah perbatasan dengan negara lain, merupakan isu politik nasional yang penting. Bagi masyarakat tersebut, bisa jadi mereka tidak pernah melihat dan merasakan kehadiran 'Indonesia', baik dalam bentuk simbol pemerintahan, politisi, birokrasi dan bahkan kantor pemerintah. Bahkan, di beberapa daerah seperti di pedalaman Papua, kehadiran 'Indonesia' terutama ditandai dengan kehadiran tentara atas nama pengendalian terhadap gerakan separatis. Pemekaran daerah otonom, oleh karenanya, bisa memperbaiki penangan politik nasional di daerah melalui peningkatan dukungan terhadap pemerintah nasional dan menghadirkan pemerintah pada level yang lebih bawah.

Tetapi, kehadiran pemerintahan DOB ini harus dibayar dengan ongkos ekonomi yang mahal, terutama dalam bentuk belanja aparat dan operasional lainnya. Selain itu, seringkali ongkos politiknya juga bisa sangat mahal, apabila pengelolaan politik selama proses dan pasca pemekaran tidak bisa dilakukan dengan baik. Sebagaimana terbukti pada beberapa daerah hasil pemekaran, ketidakmampuan untuk membangun inklusifitas politik antar kelompok dalam masyarakat mengakibatkan munculnya tuntutan untuk memekarkan lagi daerah yang baru saja mekar. Untuk mempersiapkan upaya pemekaran ini, proses pemekaran unit pemerintahan terbawah, seperti desa untuk pemekaran kabupaten dan pemekaran kabupaten untuk mempersiapkan pemekaran provinsi, merupakan masalah baru yang perlu untuk diperhatikan.

Hasil evaluasi pemekaran wilayah yang dilakukan Darmawan dkk (2008) menunjukkan bahwa dari aspek kinerja perekonomian daerah ditemukan dua masalah utama yang dapat diidentifikasi yaitu: pembagian potensi ekonomi yang tidak merata, dan beban penduduk miskin yang lebih tinggi.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi hasil studi menunjukkan bahwa daerah otonom baru lebih fluktuatif dibandingkan daerah induk yang relatif stabil dan meningkat. Diketahui bahwa daerah pemekaran telah melakukan upaya perbaikan kinerja perekonomian, namun karena masa transisi membutuhkan proses maka belum semua potensi ekonomi dapat digerakkan.

Dari sisi pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah DOB belum dapat mengejar ketertinggalan Daerah Induk meskipun kesejahteraan DOB telah relatif sama dengan daerah-daerah kabupaten lainnya. Dari sisi ekonomi, ketertinggalan DOB terhadap Daerah Induk maupun daerah lainnya pada umumnya disebabkan keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia, selain dukungan pemerintah yang belum maksimal dalam mendukung Bergeraknya perekonomian melalui investasi publik.

BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan

Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak pemekaran wilayah yang meliputi :

1. Kinerja ekonomi daerah pesisir di Provinsi Bengkulu, yakni dengan membandingkan antara sebelum dan setelah pemekaran wilayah.
2. Kinerja ekonomi Daerah Induk, DOB dan Daerah Mekar pesisir setelah pemekaran .
3. Tingkat pemerataan/kesenjangan ekonomi daerah pesisir di Provinsi Bengkulu sebelum dan setelah pemekaran wilayah.

3.2. Manfaat

Sementara manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar diperoleh gambaran tentang kinerja ekonomi daerah-daerah yang diteliti, sehingga dapat menjadi dasar dalam mengambil kebijakan pembangunan berikutnya.

BAB IV. METODE PENELITIAN

4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Provinsi Bengkulu karena merupakan salah satu provinsi yang daerah-daerah kabupatennya mengalami pemekaran pada Tahun 2003. Dampak pemekaran di provinsi ini belum pernah dikaji. Penelitian dilakukan dari bulan Juni sampai Nopember 2013.

4.2. Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah data-data sekunder yang tersedia di BPS Provinsi Bengkulu, yaitu data PDRB atas Dasar Harga Konstan, jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan (*head-count index*) baik data untuk masing-masing Daerah Induk (Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Selatan), DOB yaitu Kabupaten Mukomuko (pemekaran Kabupaten Bengkulu Utara) serta Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur (pemekaran Kabupaten Bengkulu Utara), dan Daerah Mekar yang meliputi seluruh Daerah Induk dan DOB. Kabupaten Bengkulu Tengah yang merupakan DOB untuk Kabupaten Bengkulu Utara tidak diteliti karena baru terbentuk tahun 2008. Data penelitian meliputi data sebelum pemekaran (1993, 1994-2002) dan setelah pemekaran (tahun 2003-2011). Namun ada beberapa data-data deret waktu tersebut yang tidak tersedia, sehingga untuk memperlancar analisis data digunakan data deret waktu yang lengkap tersedia.

Data-data dan informasi pendukung lainnya juga dikumpulkan guna menunjang hasil analisis. Data-data tersebut dapat berasal dari literatur-literatur, atau dari instansi-instansi atau lembaga-lembaga terkait.

4.3. Analisis Data

4.3.1. Analisis dampak pemekaran daerah pesisir

Dalam rangka mewujudkan tujuan penelitian pertama dan kedua dilakukan analisis kinerja ekonomi daerah. Menurut Tambunan (2003), Widodo (2006), Darmawan dkk (2008) dan Ajdaoike (2012) indikator-indikator kinerja ekonomi yang digunakan untuk menganalisis dampak pemekaran wilayah adalah :

1. Pertumbuhan PDRB Non-migas (ECGI)

Indikator ini mengukur gerak perekonomian daerah yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan menggunakan PDRB harga konstan.

$$ECGI_{i,t} = \frac{YNM_{i,t} - YNM_{i,t-1}}{YNM_{i,t-1}} \times 100\%$$

Dimana, YNM : PDRB non migas

i : kabupaten/kota ke-i

t : tahun ke-t

2. PDRB per Kapita (WELFI)

Indikator ini mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan.

$$WELFI_{i,t} = \frac{Y_{i,t}}{f_{i,t}}$$

Dimana, Y : PDRB

f : jumlah penduduk

3. Angka Kemiskinan (POVEI)

Pembangunan ekonomi seyogyanya mengurangi tingkat kemiskinan yang diukur menggunakan *head-count index*, yaitu persentase jumlah orang miskin terhadap total penduduk.

$$POV EI_{i,t} = \frac{Q_{i,t}}{P_{i,t}} \times 100\%$$

Dimana, Q = jumlah penduduk miskin

4.3.1.1. Kinerja ekonomi wilayah pesisir di Provinsi Bengkulu sebelum dan setelah pemekaran wilayah

Untuk menganalisis perbedaan kinerja ekonomi daerah pesisir antara sebelum dan setelah pemekaran dilakukan Uji beda t untuk setiap indikator kinerja ekonomi daerah tersebut di atas (Kuncoro, 2009).

Hipotesis matematis yang dirumuskan dan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$H_0 : \mu_{n1} = \mu_{n2}$$

$$H_a : \mu_{n1} \neq \mu_{n2},$$

Dimana, n: indikator kinerja ekonomi ke-n
 μ_1 : rata-rata sebelum pemekaran wilayah
 μ_2 : rata-rata setelah pemekaran wilayah

Selanjutnya dilakukan uji statistik dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel pada taraf kepercayaan 95 %. Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

- Jika $-t \text{ tabel } (\alpha/2) \leq t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel } (\alpha/2)$, maka terima H_0 dan tolak H_a , artinya rata-rata indikator kinerja ekonomi sebelum pemekaran wilayah sama dengan setelah pemekaran wilayah
- Jika $-t \text{ hitung} < -t \text{ tabel } (\alpha/2)$ atau $t \text{ hitung} > t \text{ tabel } (\alpha/2)$, maka terima H_a dan tolak H_0 , artinya rata-rata indikator kinerja ekonomi sebelum pemekaran wilayah tidak sama atau berbeda dengan setelah pemekaran wilayah

4.3.1.2. Kinerja ekonomi Daerah Induk, DOB dan Daerah Mekar pesisir setelah pemekaran Wilayah

Untuk mencapai tujuan penelitian yang kedua dilakukan dengan menganalisis perkembangan indikator-indikator kinerja ekonomi setelah pemekaran. Perkembangan kinerja ekonomi tersebut akan dibandingkan antara Daerah Induk, DOB dan Daerah Mekar (Darmawan dkk, 2008).

4.3.2. Analisis Pemerataan/Kesenjangan Ekonomi antar Daerah Pesisir Sebelum dan Setelah Pemekaran Wilayah

Tingkat kesenjangan ekonomi antar daerah pesisir di Provinsi Bengkulu dianalisis dengan menggunakan Indeks Kesenjangan Williamson (IW). Menurut Kuncoro (2003) untuk menghitung IW digunakan rumus :

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 f_i/n}}{Y}$$

Dimana,

Y_i = Pendapatan per kapita daerah pesisir (kabupaten) ke-i

Y = Pendapatan per kapita total daerah pesisir

f_i = Jumlah penduduk daerah pesisir (kabupaten) ke-i

n = Jumlah penduduk total daerah pesisir

Besaran IW berkisar antara 0 sampai 1. Bila IW semakin mendekati 1 maka kesenjangan ekonomi daerah pesisir semakin tinggi atau pemerataan ekonomi semakin

rendah. Bila IW semakin mendekati 0 maka kesenjangan ekonomi daerah pesisir semakin rendah, pemerataan ekonomi semakin tinggi jadi kesejahteraan lebih merata. Selanjutnya perbedaan tingkat pemerataan/kesenjangan ekonomi antar daerah pesisir antara sebelum dan setelah pemekaran wilayah dianalisis secara deskriptif.

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Gambaran Umum Daerah

5.1.1. Kabupaten Bengkulu Selatan

Kabupaten Bengkulu Selatan adalah salah satu kabupaten yang terletak di pesisir Provinsi Bengkulu yang mengalami pemekaran wilayah pada tahun 2003. Dengan demikian kabupaten ini menjadi salah satu Daerah Inti. Ibukota kabupaten ini adalah Manna.

DOB yang menjadi daerah pemekaran kabupaten ini adalah Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur. Gambaran umum Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Gambaran umum Kabupaten Bengkulu Selatan Sebelum dan Setelah Pemekaran Wilayah

| Gambaran umum | Sebelum Pemekaran | Setelah Pemekaran |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| Batas Wilayah : | | |
| • Utara | Kota Bengkulu | Kab. Seluma |
| • Timur | Prov. Sumatera Selatan | Prop. Sumatera Selatan |
| • Selatan | Prov. Lampung | Kab. Kaur |
| • Barat | Samudera Indonesia | Samudera Indonesia |
| Luas Wilayah (Km ²) | 5.955,59 | 1.186,10 |

5.1.2. Kabupaten Bengkulu Utara

Kabupaten Bengkulu Utara juga menjadi salah satu Daerah Inti dalam proses pemekaran wilayah Provinsi Bengkulu pada tahun 2003. Ibukota Kabupaten Bengkulu Utara tetap sama seperti sebelum dilaksanakannya pemekaran wilayah, yaitu Argamakmur. DOB yang terbentuk dari hasil pemekaran kabupaten ini adalah Kabupaten Mukumuko.

Tabel 3. Gambaran umum Kabupaten Bengkulu Utara Sebelum dan Setelah Pemekaran Wilayah

| Gambaran umum | Sebelum Pemekaran | Setelah Pemekaran |
|---------------------------------|--------------------------|--|
| Batas Wilayah : | | |
| • Utara | Prop. Sumatera Barat | Kab. Mukomuko |
| • Timur | Pro. Sumatera Selatan | Prop. Jambi, Kab. Lebong dan Kab. Kepahing |
| • Selatan | Prop. Lampung | Kab. Seluma dan Kota Bengkulu |
| • Barat | Samudera Indonesia | Samudera Indonesia |
| Luas Wilayah (Km ²) | 9.585,24 | 4.424,60 |

5.1.3. Kabupaten Seluma

Kabupaten Seluma adalah DOB yang terbentuk dari pemekaran Kabupaten Bengkulu Selatan. Ibukota kabupaten ini adalah Tais. Gambaran umum Kabupaten Seluma tertera dalam Tabel 4.

Tabel 4. Gambaran umum Kabupaten Seluma

| Gambaran umum | Keterangan |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Batas Wilayah : | |
| • Utara | Kota Bengkulu dan Kab. Bengkulu Utara |
| • Timur | Kab. Lahat Prop. Sumatera Selatan |
| • Selatan | Kab. Bengkulu Selatan |
| • Barat | Samudera Indonesia |
| Luas Wilayah (Km ²) | 2.400,44 |

5.1.4. Kabupaten Kaur

Kabupaten lain yang terbentuk menjadi DOB dari pemekaran Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Kabupaten Kaur. Kabupaten Kaur beribukota di Bintuhan.

Tabel 5. Gambaran umum Kabupaten Kaur

| Gambaran umum | Keterangan |
|---------------------------------|------------------------|
| Batas Wilayah : | |
| • Utara | Kab. Bengkulu Selatan |
| • Timur | Prop. Sumatera Selatan |
| • Selatan | Prop. Lampung |
| • Barat | Samudera Indonesia |
| Luas Wilayah (Km ²) | 2.369,05 |

5.1.5. Kabupaten Mukomuko

Kabupaten Bengkulu Utara dimekarkan menjadi Kabupaten Bengkulu Utara itu sendiri, Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Bengkulu Tengah. Kabupaten Bengkulu Tengah tidak diteliti karena baru terbentuk pada tahun 2008.

Tabel 6. Gambaran Umum Kabupaten Mukomuko

| Gambaran umum | Keterangan |
|---------------------------------|--|
| Batas Wilayah : | |
| • Utara | Kab. Pesisir Selatan Prop. Sumatera Barat |
| • Timur | Kab. Kerinci dan kab. Merangin Prop. Jambi |
| • Selatan | Kab. Bengkulu Utara |
| • Barat | Samudera Indonesia |
| Luas Wilayah (Km ²) | 4.036,70 km ² |

5.2. Perbandingan Kinerja Ekonomi Daerah Pesisir di Provinsi Bengkulu Sebelum dan Setelah Pemekaran Wilayah

5.2.1. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan PDRB adalah indikator pertumbuhan ekonomi yaitu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Indikator kinerja ekonomi daerah yang pertama dianalisis adalah Pertumbuhan PDRB. Data PDRB daerah pesisir yang digunakan adalah data PDRB atas Harga Konstan. Data

sebelum pemekaran wilayah (tahun 1993 sampai 2000) meliputi dua daerah pesisir yakni Kab. Bengkulu Selatan dan Kab. Bengkulu Utara. Sementara data PDRB setelah pemekaran wilayah (tahun 2004 sampai 2011) meliputi lima daerah pesisir yang disebut Daerah Mekar yaitu Kab. Seluma, Kab. Kaur, Kab. Mukomuko sebagai DOB serta Kab. Bengkulu Selatan dan Kab. Bengkulu Utara sebagai Daerah Inti.

Pertumbuhan PDRB dihitung dengan menggunakan rumus seperti yang tertera dalam metode penelitian. Rata-rata pertumbuhan PDRB daerah pesisir Provinsi Bengkulu sebelum dan setelah pemekaran wilayah disajikan dalam Tabel 7.

Tabel 7. Rata-rata Pertumbuhan PDRB Daerah Pesisir Sebelum dan Setelah Pemekaran Wilayah

| Sebelum Pemekaran Wilayah | | Setelah Pemekaran Wilayah | |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Tahun | Rata-rata Petumb. PDRB (%) | Tahun | Rata-rata Pertumb. PDRB (%) |
| 1994 | 8,06 | 2005 | 10,66 |
| 1995 | 12,25 | 2006 | 5,51 |
| 1996 | 5,11 | 2007 | 5,25 |
| 1997 | -1,04 | 2008 | -1,99 |
| 1998 | -1,46 | 2009 | 4,52 |
| 1999 | 1,60 | 2010 | 6,80 |
| 2000 | 3,83 | 2011 | 6,24 |
| Rata-rata | 4,05 | Rata-rata | 5,28 |

Sumber : Data Diolah, 2013. (Lampiran 1 dan dan 2).

Walaupun rata-rata pertumbuhan PDRB daerah pesisir sebelum pemekaran wilayah lebih rendah dibanding setelah pemekaran wilayah, namun hasil analisis uji beda rata-rata menunjukkan bahwa nilai t hitung yang diperoleh adalah sebesar -0,52. Sedang nilai t tabel (0,025;12) adalah 2,179. Dengan demikian nilai t hitung tersebut berada di antara nilai - t tabel dan nilai t tabel, maka H_0 diterima yang artinya rata-rata pertumbuhan PDRB daerah pesisir di Provinsi Bengkulu sebelum mengalami pemekaran tidak berbeda dengan setelah pemekaran wilayah (Lampiran 3).

Rata-rata pertumbuhan PDRB daerah pesisir sebelum pemekaran wilayah cenderung fluktuatif rata-rata sebesar 4,05 %/tahun. Pada tahun 1997 dan 1998 pertumbuhan PDRB menurun menjadi negatif akibat krisis ekonomi. Setelah pemekaran wilayah pertumbuhan

PDRB cenderung meningkat dengan rata-rata 5,28 %/tahun. Namun pada tahun 2008 mengalami penurunan dengan angka pertumbuhan yang negatif. Hal ini terjadi karena nilai pertumbuhan yang negatif di Kabupaten Bengkulu Utara. Penyebabnya adalah pemekaran wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang semula terdiri dari 18 kecamatan menjadi 12 kecamatan. Pada Tahun 2009, PDRB Kab. Bengkulu Utara berdasarkan harga konstan Tahun 2000 sebesar Rp. 766.582.590,-.

5.2.2. PDRB per Kapita

Nilai PDRB per kapita dihitung dengan cara membagikan nilai PDRB daerah dengan jumlah penduduk di daerah tersebut. Nilai PDRB per kapita merupakan salah satu indikator kesejahteraan ekonomi masyarakat suatu daerah. Rata-rata PDRB per kapita daerah pesisir sebelum dan setelah pemekaran wilayah tertera dalam Tabel 8.

Tabel 8. Rata-rata PDRB per Kapita Daerah Pesisir Sebelum dan Setelah Pemekaran Wilayah

| Sebelum Pemekaran Wilayah | | Setelah Pemekaran Wilayah | |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Tahun | Rata-rata PDRB/kapita (Rp) | Tahun | Rata-rata PDRB/kapita (Rp) |
| 1994 | 893.175,63 | 2004 | 1.860.497,23 |
| 1994 | 1.203.220,50 | 2005 | 2.552.642,79 |
| 1995 | 1.130.099,00 | 2006 | 2.715.681,49 |
| 1996 | 1.108.174,00 | 2007 | 2.764.819,10 |
| 1997 | 1.031.502,50 | 2008 | 2.643.105,92 |
| 1998 | 1.020.473,50 | 2009 | 2.876.746,36 |
| 1999 | 1.031.049,50 | 2010 | 3.041.784,15 |
| 2000 | 1.149.214,00 | 2011 | 3.160.282,57 |
| Rata-rata | 1.070.863,58 | Rata-rata | 2.701.944,95 |

Sumber : Data Diolah, 2013. (Lampiran 4 dan 5).

Rata-rata PDRB per kapita daerah pesisir sebelum dan setelah pemekaran wilayah cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Namun peningkatan PDRB per kapita sebelum pemekaran rata-rata hanya 4,46 % per tahun sementara setelah pemekaran wilayah peningkatannya sebesar 8,50 % per tahun.

Rata-rata pendapatan per kapita daerah pesisir sebelum pemekaran wilayah sebesar Rp 1.070.863,58 meningkat menjadi Rp 2.701.944,95 setelah pemekaran wilayah. Namun pendapatan per kapita daerah pesisir ini masih sangat rendah dibanding pendapatan per

kapita Provinsi Bengkulu yang mencapai Rp 5.100.000 pada tahun 2011 (Noviansa, 2013). Hal ini terjadi karena daerah pesisir yang menjadi objek penelitian adalah daerah-daerah yang PDRB nya didominasi oleh sumbangan sektor primer seperti sektor pertanian yang bernilai rendah.

Namun jika dibandingkan dengan sebelum pemekaran wilayah, tingkat pendapatan per kapita setelah pemekaran lebih tinggi. Artinya tingkat kesejahteraan penduduk meningkat setelah pemekaran wilayah dilakukan. Hal ini didukung oleh hasil analisis beda rata-rata PDRB per kapita daerah pesisir sebelum dan setelah pemekaran wilayah yang menunjukkan bahwa nilai t hitung yang diperoleh adalah sebesar -11,33 (Lampiran 6). Nilai t hitung (-11,33) lebih kecil dari nilai $-t$ tabel (0,025;14) (-2,145). Jadi terima H_0 , artinya rata-rata PDRB per kapita daerah pesisir sebelum pemekaran wilayah tidak sama dengan rata-rata PDRB per kapita setelah pemekaran wilayah, dimana rata-rata PDRB per kapita sebelum pemekaran wilayah lebih rendah dibanding setelah pemekaran wilayah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran wilayah berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah pesisir di Provinsi Bengkulu. Hal ini sesuai dengan pernyataan Khalid (2012) bahwa dengan dibentuknya DOB maka terdapat peluang yang besar bagi akselerasi pembangunan ekonomi di wilayah yang baru diberi status sebagai daerah otonomi dengan pemerintahan sendiri. Bukan hanya infrastruktur pemerintahan yang terbangun, tetapi juga infrastruktur fisik yang menyertainya, seperti infrastruktur jalan, transportasi, komunikasi dan sejenisnya. Selain itu, kehadiran pemerintah DOB juga memungkinkan lahirnya infrastruktur kebijakan pembangunan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah DOB. Semua infrastruktur ini membuka peluang yang lebih besar bagi wilayah hasil pemekaran untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi.

Sementara itu Daerah Inti semakin mampu memperkuat perekonomian karena sumberdaya alam dan manusia produktif yang terkonsentrasi di daerah ini. Sumbangan sektor selain pertanian yang umumnya berkembang yakni sektor perdagangan, hotel dan restoran semakin berkembang mengiringi sumbangan sektor pertanian yang semakin menurun.

5.2.3. Angka Kemiskinan

Rata-rata angka kemiskinan sebelum dan setelah pemekaran disajikan dalam Tabel 9. Angka kemiskinan relatif hampir sama yakni sebesar 26,01 % saat sebelum pemekaran dan 26,20 % setelah pemekaran dilakukan (Tabel 9).

Tabel 9. Rata-rata Angka Kemiskinan Daerah Pesisir Sebelum dan Setelah Pemekaran Wilayah

| Sebelum Pemekaran Wilayah | | Setelah Pemekaran Wilayah | |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Tahun | Rata-rata Angka Kemiskinan (%) | Tahun | Rata-rata Angka Kemiskinan (%) |
| 2000 | 22,85 | 2005 | 31,10 |
| 2002 | 29,17 | 2006 | 31,73 |
| Rata-rata | 26,01 | 2007 | 30,50 |
| | | 2008 | 31,27 |
| | | 2009 | 21,81 |
| | | 2010 | 18,48 |
| | | 2011 | 18,51 |
| | | Rata-rata | 26,20 |

Sumber : Data Diolah, 2013. (Lampiran 7).

Rata-rata angka kemiskinan di daerah pesisir ini jauh lebih tinggi dibanding angka kemiskinan provinsi. Pada kurun waktu tahun 2000-2002 (sebelum pemekaran) rata-rata angka kemiskinan provinsi sebesar 20,04 % dan setelah pemekaran sebesar 20,45 %. Tingkat kemiskinan penduduk di daerah pesisir umumnya memang lebih tinggi. Menurut Ani (2009) 60 % penduduk miskin Indonesia berada di daerah pesisir. Begitu pula dengan Provinsi Bengkulu, sebagian besar penduduk miskin terkonsentrasi di daerah pesisir. Kondisi ini disebabkan oleh karena umumnya masyarakat pesisir bekerja sebagai nelayan yang berpendapatan rendah dengan resiko dan ketidakpastian pekerjaan yang tinggi.

Namun, hasil uji beda rata-rata untuk indikator angka kemiskinan menunjukkan bahwa angka kemiskinan daerah pesisir sebelum pemekaran wilayah sama atau tidak berbeda dengan setelah pemekaran wilayah. Nilai t hitung yang diperoleh adalah -0,04 sementara nilai t tabel (0,025;7) adalah 2,365. Nilai t hitung berada di antara nilai $-t$ tabel dan t tabel sehingga H_0 diterima.

Hasil analisis tentang angka kemiskinan yang tidak berbeda antara sebelum dan setelah pemekaran wilayah ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Ani (2009) bahwa jumlah penduduk miskin pesisir sejak tahun 2005 tidak berkurang. Penyebabnya adalah sekitar 90 % kegiatan perikanan dilakukan secara tradisional yang minim info dan pengetahuan, kekurangan moda transportasi laut, pengelolaan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir yang buruk. Sebagian besar nelayan menangkap ikan jauhnya kurang dari 3 mil dengan alat yang minim sehingga pendapatan mereka pun minim. Pada Bagian 5.2.2. sudah dijelaskan bahwa rata-rata PDRB per kapita masyarakat daerah pesisir di Provinsi Bengkulu baik sebelum maupun setelah pemekaran wilayah masih sangat rendah disbanding PDRB per kapita provinsi. Sebelum pemekaran hanya sebesar Rp 1.070.863,58 dan setelah pemekaran hanya Rp 2.701.944,95.

5.3. Kinerja Ekonomi Daerah Induk, DOB dan Daerah Mekar Pesisir di Provinsi Bengkulu Setelah Pemekaran Wilayah

5.3.1. Pertumbuhan PDRB

Menurut Darmawan dkk (2008) pertumbuhan ekonomi menunjukkan gerak berbagai sektor pembangunan dan merupakan juga sumber penciptaan lapangan kerja. Adanya peningkatan nilai tambah di perekonomian mengisyaratkan peningkatan aktivitas ekonomi, baik yang sifatnya internal di daerah yang bersangkutan, maupun dalam kaitannya dengan interaksi antar daerah.

Rata-rata pertumbuhan PDRB daerah pesisir di Provinsi Bengkulu setelah dilakukannya pemekaran wilayah dapat dilihat pada Tabel 10. Rata-rata pertumbuhan PDRB tahun 2008 sebesar -11,95 yang disebabkan oleh pertumbuhan PDRB Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2008 tersebut yang bernilai -28,75, sementara daerah-daerah lain mengalami pertumbuhan PDRB yang bernilai positif dan relatif stabil. Rata-rata pertumbuhan DOB dan Daerah Mekar juga sangat tinggi pada tahun 2005. Hal ini disebabkan oleh tingginya pertumbuhan PDRB Kabupaten Kaur yang mencapai 30,55 % pada tahun tersebut (Lampiran 10).

Tabel 10. Rata-rata Pertumbuhan PDRB Daerah Inti, DOB dan Daerah Mekar Setelah Pemekaran Wilayah

| Tahun | Rata-rata Pertumbuhan PDRB (%) | | |
|------------------|--------------------------------|-------------|--------------|
| | Daerah Inti | DOB | Daerah Mekar |
| 2005 | 5,52 | 14,09 | 10,66 |
| 2006 | 6,13 | 5,10 | 5,51 |
| 2007 | 5,82 | 4,87 | 5,25 |
| 2008 | -11,95 | 4,64 | -1,99 |
| 2009 | 4,99 | 4,21 | 4,52 |
| 2010 | 5,61 | 7,59 | 6,80 |
| 2011 | 6,33 | 6,18 | 6,24 |
| Rata-rata | 3,21 | 6,67 | 5,28 |

Sumber : Data Diolah, 2013. (Lampiran 12)

Untuk itu, agar nilai rata-rata pertumbuhan PDRB tidak “dirusak” oleh data tahun 2005 dan 2008 yang terlalu mencolok, maka data-data tersebut dikeluarkan dari penghitungan nilai rata-rata (Tabel 11).

Jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2005 sampai 2011 yang sebesar 5,73 % per tahun (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2012), maka rata-rata pertumbuhan PDRB daerah pesisir di Provinsi Bengkulu ini relatif baik karena sama dan lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

Tabel 11. Rata-rata Pertumbuhan PDRB Daerah Inti, DOB dan Daerah Mekar Tahun 2006 sampai 2011 (Data Tahun 2008 Dikeluarkan)

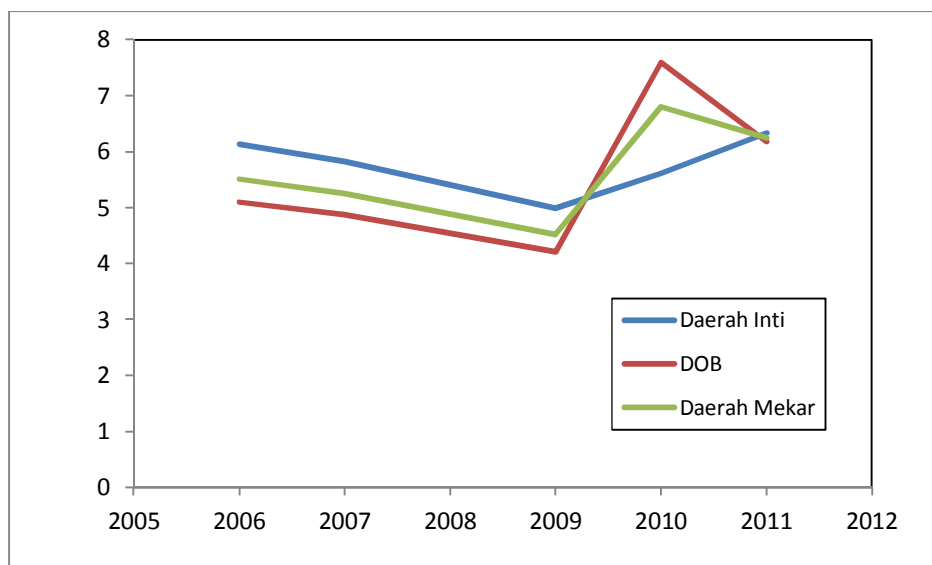
| Tahun | Rata-rata Pertumbuhan PDRB (%) | | |
|------------------|--------------------------------|-------------|--------------|
| | Daerah Inti | DOB | Daerah Mekar |
| 2006 | 6,13 | 5,10 | 5,51 |
| 2007 | 5,82 | 4,87 | 5,25 |
| 2009 | 4,99 | 4,21 | 4,52 |
| 2010 | 5,61 | 7,59 | 6,80 |
| 2011 | 6,33 | 6,18 | 6,24 |
| Rata-rata | 5,78 | 5,59 | 5,66 |

Sumber : Data Diolah, 2013. (Lampiran 9, 10, 11, 12)

Setelah dilakukan perbaikan penghitungan maka diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan PDRB Daerah Inti adalah yang paling tinggi (5,78 % per tahun) dibanding DOB (5,59 % per tahun) dan Daerah Mekar (5,66 % per tahun) (Tabel 11). Ketiga daerah ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif baik. Darmawan dkk (2008) menyatakan bahwa suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik jika angka pertumbuhannya antara 5 % sampai 6 % per tahun.

Pertumbuhan ekonomi Daerah Inti paling tinggi dibanding DOB dan Daerah Mekar, karena Daerah Inti sudah mapan secara ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi di DOB lebih rendah dan bersifat fluktuatif dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Daerah Induk. Hasil penelitian Abdullah (2011) juga menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamasa lebih rendah dibanding Kabupaten Polewali Mandar yang menjadi Daerah Induknya. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Darmawan dkk (2008) dimana laju pertumbuhan ekonomi di Daerah Inti lebih stabil sementara di DOB cenderung fluktuatif. Fluktuasi tersebut antara lain disebabkan oleh dominannya sektor pertanian sebagai komponen terbesar dalam perekonomian DOB. Sektor pertanian sangat rentan terhadap perubahan harga, pergantian musim maupun iklim. Akibatnya perubahan sedikit saja pada komponen tersebut akan sangat berpengaruh pada pembentukan PDRB.

Menurut BPS Provinsi Bengkulu (2013) kinerja perekonomian Provinsi Bengkulu selama lima tahun terakhir (2008-2012) selalu mengalami pertumbuhan terutama pada tahun 2012 dimana perekonomian mengalami pertumbuhan tertinggi dan tahun 2008 terendah selama dekade tersebut. Hal ini juga tampaknya terjadi di daerah peisisir Provinsi Bengkulu yang mendominasi wilayah provinsi (Gambar 1). Krisis global yang terjadi pada akhir tahun 2008 mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menurun tetapi meningkat lagi di tahun 2009.



Gambar 1. Perkembangan Rata-rata Pertumbuhan PDRB Daerah Inti, DOB dan Daerah Mekar (dalam %) Tahun 2006 sampai 2011

Hasil penelitian ini senada dengan hasil penelitian Ajdaoike (2012) dimana kondisi DOB secara umum masih berada di bawah kondisi Daerah Induk. Pertumbuhan ekonomi DOB lebih fluktuatif dibandingkan dengan Daerah Induk yang relatif stabil dan terus meningkat.

Daerah Inti daerah pesisir Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang relatif stabil karena ditunjang oleh sektor selain pertanian. Sejak sebelum pemekaran, Daerah Inti sudah mengalami pembangunan ekonomi yang lebih baik. Sektor-sektor ekonomi selain pertanian sudah lebih berkembang seiring dengan penambahan waktu seperti sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa. Hal ini dapat dilihat dari data-data berikut : PDRB Kabupaten Bengkulu Utara didominasi oleh sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 36 % dari total PDRB. Posisi kedua adalah sektor jasa-jasa (17 %) dan posisi ketiga adalah sektor pertambangan dan penggalian (14 %) (Adm. Penanaman Modal Kabupaten Bengkulu Utara, 2011).

Sementara itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (2011) menyatakan bahwa PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan memang masih didominasi oleh sektor pertanian

dengan sumbangan sebesar 31,84 % pada tahun 2009. Namun diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran (26,32 %) dan sektor jasa-jasa (22,01 %).

DOB daerah pesisir Provinsi Bengkulu adalah Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur dan Kabupaten Mukomuko. Sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB DOB lebih tinggi dibanding terhadap PDRB Daerah Inti. Hal ini wajar terjadi pada daerah yang baru terbentuk. Sektor primer tentu saja menjadi andalan dalam perekonomian. Sebelum pemekaran wilayah dilakukan, DOB umumnya merupakan wilayah plasma dari Daerah Inti. Sebagai daerah plasma DOB ini menjadi penghasil komoditi pertanian. Maka wajar saja jika setelah pemekaran wilayah dilakukan, sektor pertanian memberikan kontribusi tertinggi bagi PDRB.

Menurut *Indonesian Investment Coordinating Board* (2012) pada tahun 2010 sektor pertanian memberikan kontribusi tertinggi terhadap PDRB Kabupaten Seluma atas harga konstan, yaitu sebesar 53,50 %. Sektor berikutnya adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 13,74 % dan sektor jasa-jasa sebesar 12,71 %. Data BPS Kabupaten Kaur (2012) menunjukkan pada tahun 2010 Kabupaten Kaur memiliki PDRB atas harga berlaku yang dominan disumbangkan oleh sektor pertanian yaitu sebesar 45,63 %. Penyumbang terbesar berikutnya adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 19,27 % dan jasa-jasa sebesar 13,46 %. Berdasarkan data dari *Indonesian Investment Coordinating Board* (2012) pada tahun 2011, sama dengan DOB lain, Kabupaten Mukomuko juga memiliki PDRB dimana sektor pertanian memberikan sumbangan terbesar yaitu 41,21 % dengan laju pertumbuhan tertinggi pula dibanding sektor-sektor lain. Lalu diikuti juga oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran (16,46 %). Namun dibanding DOB yang lain di Kabupaten Mukomuko sektor industri pengolahan menyumbang 13,89 % dari PDRB kabupaten.

Besaran kontribusi sektor dominan mampu mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. DOB yang memiliki sumbangan sektor pertanian tertinggi yaitu Kabupaten Seluma mempunyai pendapatan per kapita paling rendah yaitu sebesar Rp 1.886.967,29. Sementara itu kontribusi sektor industri yang paling besar yaitu di Kabupaten Mukomuko berdampak pula pada pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Mukomuko paling tinggi dibanding DOB lain yakni rata-rata sebesar Rp 3.588.731,45 (Lampiran 5). Hal

ini mencerminkan bahwa dalam tahap awal pembangunan ekonomi suatu daerah, sumbangan sektor pertanian masih tinggi. Seiring dengan kemajuan ekonomi dan pencapaian hasil-hasil pembangunan yang ditandai oleh meningkatnya sumbangan sektor industri, maka akan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai *leading sector* di DOB, sektor pertanian sangat rentan terhadap gejolak harga, baik harga komoditi maupun hal-hal lain yang secara teknis mempengaruhi nilai tambah sektor pertanian. Oleh karena itu, kemajuan perekonomian DOB sangat tergantung pada usaha pemerintah dan masyarakat dalam menggerakkan sektor tersebut. Porsi perekonomian daerah DOB yang lebih kecil dibandingkan daerah lain dalam perekonomian satu wilayah (provinsi) mengindikasikan, bahwa secara relatif daerah DOB belum memiliki peran dalam pengembangan perekonomian regional (Ajdaoke, 2012).

Selanjutnya menurut Ajdaoke (2012) hal-hal yang diduga menjadi penyebabnya antara lain adalah Pertama, pembagian sumber-sumber perekonomian antara daerah DOB dan Daerah Induk tidak merata. Daerah induk biasanya mendominasi pembagian sumber daya ekonomi seperti kawasan industri maupun sumber daya alam produktif. Kedua, investasi swasta di DOB juga relatif kecil sehingga tidak banyak terjadi perubahan yang cukup signifikan untuk mendongkrak perekonomian daerah. Ketiga, perekonomian di DOB belum digerakkan secara optimal oleh pemerintah daerah, baik karena kurang efektifnya program-program yang dijalankan, maupun karena alokasi anggaran pemerintah yang belum optimal.

5.3.2. Pendapatan Per Kapita dan Angka Kemiskinan

PDRB per kapita adalah indikator makro yang secara agregat dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat dari gerak pertumbuhan ekonomi di daerah yang bersangkutan. Jika pendapatan per kapita meningkat maka angka kemiskinan dengan sendirinya akan menurun.

Dari hasil penelitian pada Tabel 12 pendapatan per kapita Daerah Inti adalah Rp 3.066.533,08 paling tinggi dibanding DOB (Rp 2.458.886,20) dan Daerah Mekar (Rp 2.701.944,95). Hasil penelitian ini senada dengan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Darmawan dkk (2008). Kondisi yang demikian dapat dijelaskan karena Daerah Induk memiliki

potensi sumber daya yang lebih siap, baik pemerintahan, masyarakat maupun infrastrukturnya. Hal ini juga mempercepat pembangunan di Daerah Induk, karena setelah pemekaran wilayah jumlah penduduk lebih sedikit (246.126 jiwa) dibanding sebelum pemekaran wilayah (390.606 jiwa) sementara setelah pemekaran wilayah kualitas sumberdaya ekonomi lebih baik dan lebih mapan.

Indikator kesejahteraan PDRB per kapita dihubungkan dengan indikator angka kemiskinan. Dari Tabel 13 diketahui bahwa Daerah Inti memiliki angka kemiskinan rata-rata terendah yakni 25,54 %, sementara DOB memiliki angka kemiskinan tertinggi yaitu sebesar 26,64 %. Peningkatan pendapatan per kapita di Daerah Inti, DOB maupun Daerah Mekar diiringi oleh penurunan jumlah penduduk miskin di daerah-daerah tersebut (Gambar 2).

Tabel 12. Rata-rata PDRB per kapita Daerah Inti, DOB dan Daerah Mekar Tahun 2004 sampai 2011

| Tahun | Rata-rata PDRB per kapita (Rp) | | |
|------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| | Daerah Inti | DOB | Daerah Mekar |
| 2004 | 1.485.616,32 | 2.110.417,84 | 1.860.497,23 |
| 2005 | 2.965.360,57 | 2.277.497,60 | 2.552.642,79 |
| 2006 | 3.210.056,95 | 2.386.097,85 | 2.715.681,49 |
| 2007 | 3.290.558,22 | 2.414.326,36 | 2.764.819,10 |
| 2008 | 2.896.172,31 | 2.474.395,00 | 2.643.105,92 |
| 2009 | 3.396.948,14 | 2.529.945,18 | 2.876.746,36 |
| 2010 | 3.559.316,30 | 2.696.762,72 | 3.041.784,15 |
| 2011 | 3.728.235,80 | 2.781.647,08 | 3.160.282,57 |
| Rata-rata | 3.066.533,08 | 2.458.886,20 | 2.701.944,95 |

Sumber: Data Diolah, 2013. (Lampiran 13).

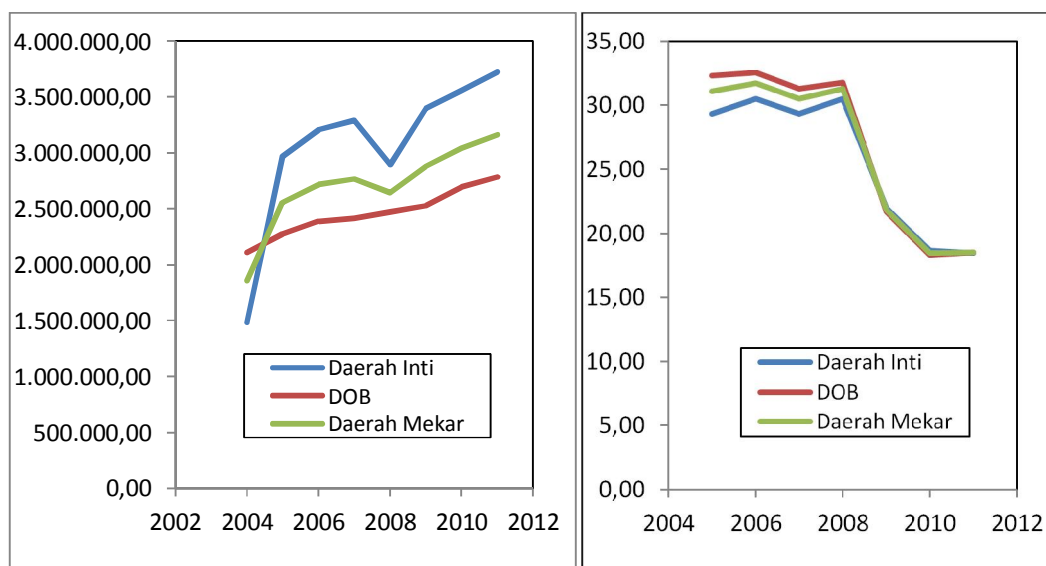
Grafik pada Gambar 2 menunjukkan bahwa seiring dengan peningkatan PDRB per kapita, angka kemiskinan pun menurun. Pada awal mula pemekaran wilayah dilakukan, angka kemiskinan paling tinggi terjadi di DOB. Penyebabnya adalah antara lain bahwa DOB merupakan daerah pinggiran atau plasma bagi Daerah Inti. DOB masih menggantungkan perekonomiannya pada sektor pertanian. Menurut Ikhsan (2001) dalam Darmawan dkk (2008) umumnya sektor pertanian menyumbang kemiskinan cukup tinggi. Penyebab lain adalah terbatasnya infrastruktur penunjang seperti fasilitas pendidikan, ekonomi maupun

fasilitas lain dimana umumnya DOB berada jauh dari ibukota kabupaten. Selanjutnya Darmawan dkk (2008) menambahkan bahwa ketertinggalan DOB juga disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya alam dan manusia yang tersedia serta kurang maksimalnya dukungan pemerintah dalam menggerakkan perekonomian melalui investasi publik.

Tabel 13. Rata-rata Angka Kemiskinan Daerah Inti, DOB dan Daerah Mekar Tahun 2005 sampai 2011

| Tahun | Rata-rata Angka Kemiskinan (%) | | |
|------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| | Daerah Inti | DOB | Daerah Mekar |
| 2005 | 29,32 | 32,30 | 31,10 |
| 2006 | 30,51 | 32,54 | 31,73 |
| 2007 | 29,32 | 31,29 | 30,50 |
| 2008 | 30,51 | 31,78 | 31,27 |
| 2009 | 21,98 | 21,69 | 21,81 |
| 2010 | 18,69 | 18,35 | 18,48 |
| 2011 | 18,48 | 18,53 | 18,51 |
| Rata-rata | 25,54 | 26,64 | 26,20 |

Sumber: Data Diolah, 2013. (Lampiran 14).



Gambar 2. Perkembangan Rata-rata PDRB per Kapita (dalam Rupiah (Kiri) dan Angka Kemiskinan (dalam %) (Kanan)

Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak tahun 2009 angka kemiskinan di Daerah nti, DOB dan Daerah Mekar cenderung menurun ke angka kemiskinan yang relatif hampir sama besarnya menjadi sekitar 18 %. Kondisi ini disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup drastis pada tahun 2009 setelah menurun pada tahun 2008 karena krisis ekonomi (Gambar 1) dan peningkatan pendapatan per kapita (Tabel 12 dan Gambar 2).

Menurunnya angka kemiskinan pada tahun 2009 di semua daerah kemungkinan juga disebabkan oleh keberhasilan program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Misalnya di Kabupaten Bengkulu Utara penurunan jumlah masyarakat miskin merupakan dampak dari terciptanya lebih banyak lapangan kerja akibat dari pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

Menurut Anonim (2008) pemerintah menyediakan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 22,3 trilyun untuk pembiayaan program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan Keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, irigasi, air minum dan sanitasi. Juga di bidang pertanian, kelautan, perikanan, sarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana dan prasarana perdesaan serta perdagangan. Begitu pula dengan program penanggulangan kemiskinan yang langsung untuk rumah tangga miskin dan sangat miskin maupun program pemberdayaan masyarakat seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

5.4. Pemerataan/Kesenjangan Ekonomi antar Daerah Pesisir di Provinsi Bengkulu Sebelum dan Setelah Pemekaran Wilayah

Pemerataan/Kesenjangan ekonomi diukur dengan Indeks Williamson (IW). Tingkat kesenjangan ekonomi daerah pesisir Provinsi Bengkulu sebelum dan setelah pemekaran wilayah tertera dalam Tabel 14.

Analisis kesenjangan ekonomi antar daerah pesisir memberikan hasil bahwa sebelum pemekaran wilayah dilakukan, kesenjangan ekonomi cenderung rendah yang ditunjukkan oleh nilai rata-rata Indeks Williamson (IW) sebesar 0,22. Namun setelah pemekaran wilayah, kesenjangan ekonomi antar daerah pesisir justru meningkat menjadi rata-rata 0,54.

Penyebabnya adalah sebelum pemekaran dilakukan daerah-daerah pesisir memiliki PDRB per kapita yang hampir sama yakni Rp 925.068,67 untuk Kabupaten Bengkulu Utara dan Rp 1.216.658,49 (Lampiran 15). Penyebabnya adalah adanya kesetaraan kemampuan kedua daerah tersebut membangun perekonomian.

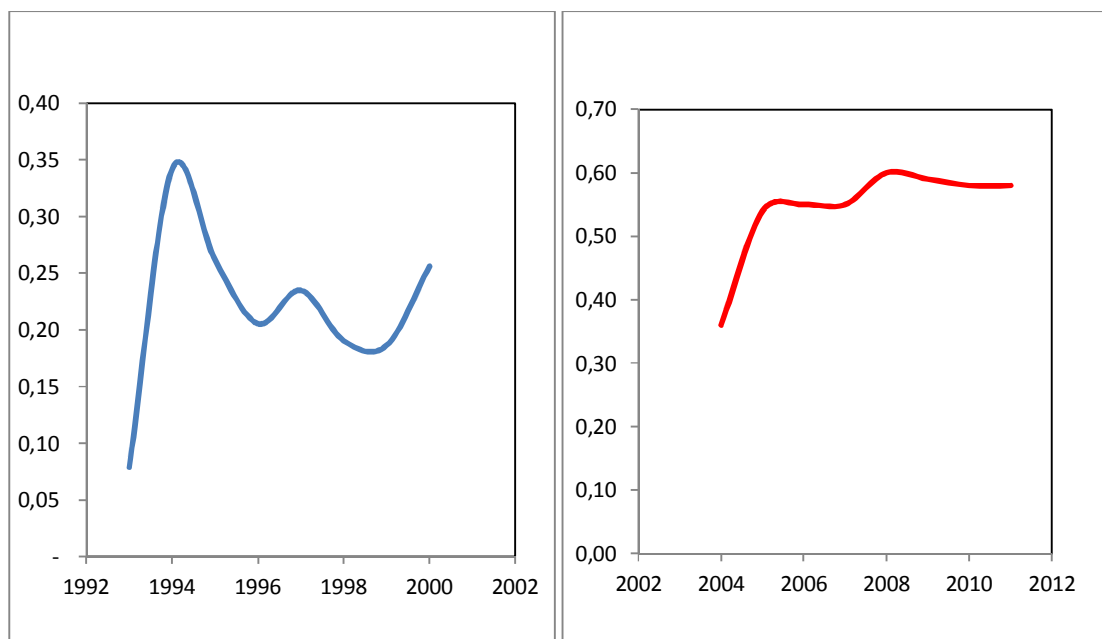
Tabel 14. Tingkat Kesenjangan Ekonomi yang Diukur dengan Indeks Williamson (IW) Antar Daerah Pesisir Sebelum dan Setelah Pemekaran Wilayah

| Sebelum Pemekaran | | Setelah Pemekaran | |
|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Tahun | Tingkat Kesenjangan Ekonomi (IW) | Tahun | Tingkat Kesenjangan Ekonomi (IW) |
| 1993 | 0,08 | 2004 | 0,36 |
| 1994 | 0,34 | 2005 | 0,54 |
| 1995 | 0,26 | 2006 | 0,55 |
| 1996 | 0,21 | 2007 | 0,55 |
| 1997 | 0,23 | 2008 | 0,60 |
| 1998 | 0,19 | 2009 | 0,59 |
| 1999 | 0,19 | 2010 | 0,58 |
| 2000 | 0,26 | 2011 | 0,58 |
| Rata-rata | 0,22 | Rata-rata | 0,54 |

Sumber: Data Primer Diolah, 2013. (Lampiran 15 dan 16)

Perbedaan dan perkembangan tingkat kesenjangan ekonomi daerah pesisir sebelum dan setelah pemekaran wilayah dapat dilihat pada Gambar 3.

Sementara setelah pemekaran, terdapat lima kabupaten yang memiliki PDRB per kapita yang nilainya jauh berbeda antara kabupaten satu dengan kabupaten lainnya (Lampiran 16). Seperti telah diuraikan sebelumnya, setelah pemekaran dilakukan terdapat dua Daerah Induk dan tiga DOB. Tingkat kesejahteraan DOB yang ditunjukkan oleh nilai PDRB perkapita (rata-rata Rp 2.458.886,20) lebih rendah dibanding Daerah Induk yang memiliki PDRB per kapita rata-rata sebesar Rp 3.066.533,08. Kesenjangan ekonomi menjadi tinggi disebabkan oleh perbedaan kemampuan antara Daerah induk dan DOB dalam menggerakkan perekonomian. Hasil analisis kesenjangan ekonomi daerah pesisir ini semakin memperkuat hasil analisis untuk tujuan pertama dan kedua penelitian ini.



Gambar 3. Perkembangan Nilai Indeks Kesenjangan Williamson antar Daerah Pesisir Sebelum Pemekaran Wilayah (Kiri) dan Setelah Pemekaran Wilayah (Kanan)

Temuan tentang kesenjangan ekonomi yang lebih tinggi setelah dilakukan pemekaran wilayah (Tabel 14 dan Gambar 3) sejalan dengan hasil studi evaluasi dampak pemekaran wilayah yang dilakukan oleh Darmawan dkk (2008). Penyebab kesenjangan ekonomi tersebut antara lain adalah pembagian sumberdaya-sumberdaya ekonomi yang tidak merata antara DOB dan Daerah Induk wilayah pesisir Bengkulu, dimana Daerah Induk sudah mulai didominasi oleh kawasan perdagangan, hotel dan restoran serta sumberdaya produktif. Investasi oleh swasta dan program-program pembangunan di DOB belum berjalan dengan efektif. Maka hasil analisis ini mendukung kesimpulan yang dirumuskan oleh Darmawan dkk (2008) bahwa pemekaran wilayah menghasilkan daerah-daerah yang masih harus berjuang keras untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakatnya.

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan berikut :

1. Hasil uji beda rata-rata kinerja ekonomi daerah pesisir di Provinsi Bengkulu antara sebelum dan setelah pemekaran wilayah menunjukkan bahwa : a) untuk indikator pertumbuhan ekonomi, tidak ada perbedaan antara sebelum dan setelah pemekaran wilayah, b) untuk indikator PDRB per kapita, berbeda nyata, dimana PDRB per kapita setelah pemekaran wilayah lebih tinggi dibanding sebelum pemekaran, dan c) untuk indikator angka kemiskinan, tidak ada perbedaan antara sebelum dengan setelah pemekaran wilayah.
2. Hasil analisis kinerja ekonomi Daerah Induk, DOB dan Daerah Mekar pesisir di Provinsi Bengkulu setelah pemekaran menunjukkan bahwa a) pertumbuhan ekonomi Daerah Inti paling tinggi dan relatif stabil sedang pertumbuhan ekonomi DOB paling rendah dan cenderung fluktuatif, b) PDRB per kapita tertinggi terjadi di Daerah Inti dan yang terendah di DOB, dan c) angka kemiskinan paling rendah terdapat di Daerah Inti dan yang tertinggi di DOB.
3. Tingkat kesenjangan ekonomi daerah pesisir di Provinsi Bengkulu setelah pemekaran wilayah lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum pemekaran wilayah.

6.2. Saran

1. Perlu dilakukan pembagian sumberdaya alam, manusia, infrastruktur penunjang antara Daerah Inti dan DOB agar daerah-daerah tersebut berkembang seimbang sehingga dampak pemekaran yang diidamkan berupa pemerataan kesejahteraan dapat diwujudkan.
2. Perlu diupayakan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan penduduk daerah pesisir yang umumnya bermatapencahariaan sebagai nelayan antara lain melalui peningkatan pengetahuan, penguasaan teknologi dan akses permodalan.

3. Perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang dampak-dampak pemekaran wilayah yang lain misalnya dampak sosio kultural, pelayanan publik dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad Arafat. Kajian Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Pembangunan Daerah (Studi Kasus: Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat). Thesis Program Studi Ilmu-ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan perdesaan Institut Pertanian Bogor. <http://repository.ipb.ac.id>. 2011. Diakses Tanggal 15 Nopember 2013 Pukul 19.10 WIB.
- Ajdaoke. Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Kesejahteraan Masyarakat. <http://ajdaoke.wordpress.com>. 2012. Diakses Tanggal 29 Maret 2013 Pukul 20.12 WIB.
- Adm. Penanaman Modal Kabupaten Bengkulu Utara. Perkembangan Ekonomi Daerah. <http://www.investasi.bengkuluutarakab.go.id>. 2011. Diakses Tanggal 10 Nopember 2013 Pukul 20.22 WIB.
- Ani. Penduduk Miskin Tersebar di Kawasan Pesisir. <http://bisniskeuangan.kompas.com>. 2009. Diakses Tanggal 15 Nopember 2013 Pukul 10.32 WIB.
- Anonim. Menyimak Penurunan Angka Kemiskinan. <http://PNPM-mandiri.org>. 2008. Diakses Tanggal 14 Nopember 2013 Pukul 21.19 WIB.
- _____. Pemekaran Daerah di Indonesia. <http://id.wikipedia.org>. 2009. Diakses Tanggal 13 Maret 2013 Pukul 10.13 WIB.
- _____. Enam Alasan Pemekaran/Pembentukan Daerah Otonom. <http://phylopop.com>. 2012. Diakses Tanggal 29 Maret 2013 Pukul 19.36 WIB.
- _____. Pemerintah Nyatakan Pemekaran Tiga Kabupaten di Provinsi Bengkulu Sesuai dengan Konstitusi. <http://beritahukum.com>. 2013. Diakses Tanggal 30 Maret 2013 Pukul 13.10 WIB.
- BPS Kabupaten Kaur. PDRB Kabupaten Kaur Tahun 2011. <http://bappeda.kaurkab.go.id>. 2012. Diakses Tanggal 10 Nopember 2013 Pukul 21.15 WIB.
- BPS Provinsi Bengkulu. PDRB Provinsi Bengkulu menurut Penggunaan 2012. <http://bengkulu.bps.go.id>. 2013. Diunduh Tanggal 10 Nopember 2013 Pukul 13.28 WIB.
- Darmawan, Nazara, S., Jackson, D., Ahmad, T., Purwanto, D.A. Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerja sama dengan *United Nations Development Programme* (UNDP). <http://undp.or.id>. 2008. Diakses Tanggal 4 April 2013 Pukul 10.34 WIB.
- Gulo, M. R. Memahami dengan Benar Tujuan Pemekaran. <http://niasbarat.wordpress.com>. 2007. Diakses Tanggal 29 Maret 2013 Pukul 19.00 WIB.

- Handoko, R. Problem Kesenjangan Antar Daerah di Era Otonomi. <http://wikimu.com>. 2008. Diakses tanggal 30 Maret 2013 Pukul 15.49 WIB.
- Harmantyo, Dj. Desentralisasi, Otonomi, Pemekaran Daerah dan Pola Perkembangan Wilayah di Indonesia. <http://geografi.ui.ac.id>. 2011. Diakses Tanggal 28 Maret 2013 Pukul 10.53 WIB.
- Indonesian Investment Coordinating Board*. Display Ekonomi PDRB Kabupaten Muko-Muko. <http://regionalinvestment.bkpm.go.id>. 2012. Diakses Tanggal 10 Nopember 2013 Pukul 21.30 WIB.
- _____. Display Ekonomi PDRB Kabupaten Seluma. <http://regionalinvestment.bkpm.go.id>. 2012. Diakses Tanggal 10 Nopember 2013 Pukul 22.11 WIB.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data Pokok APBN 2005–2011. <http://www.anggaran.depkeu.go.id>. 2012. Diunduh Tanggal 10 Nopember 2013 Pukul 13.21 WIB .
- Khalid, T. M. Otonomi Daerah : Tujuan Pemekaran dan Penggabungan Daerah. <http://tengkumahesakhalid.blogspot.com>. 2012. Diakses Tanggal 29 Maret 2013 Pukul 20.30 WIB.
- Kuncoro, M. Ekonomi Pembangunan. UPP AMP YKPN.Yogyakarta. 2003. 654 halaman.
- _____. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi, Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis? Erlangga.Jakarta. 2009.Edisi Ketiga. 334 halaman.
- Noviansa, Revi. Sektor Pendapatan Regional, Kategori Potens Daerah. <http://kp2tprovbengkulu.info>. 2013. Diakses Tanggal 15 Nopember 2013 Pukul 09.15 WIB.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang (RPJMP) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010-2015. <http://bengkulu.bpk.go.id>. 2011. Diakses Tanggal 10 Nopember 2013 Pukul 20.50 WIB.
- Tambunan, T. Perekonomian Indonesia, Beberapa Masalah Penting. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2003. 412 halaman.
- Widodo, T. Perencanaan Pembangunan : Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah). UPP STIM YKPN. Yogyakarta. 2006. 322 halaman.
- Witrianto. Profil Provinsi Bengkulu, Sejarah Pemerintahan. <http://bengkuluprov.go.id>. 2013. Diakses Tanggal 3 April 2013 Pukul 18.16 Wib.